

Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah dengan Pembangunan di Negara Anggota OKI

Linkage Analysis of Islamic Finance Inclusion with Development in OIC member Countries

Deni Lubis¹, Muhammad Giffari Ramadhoni²

Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor, Indonesia 16680

Email: ¹denilubis@gmail.com, ²giffari773@gmail.com

Abstract. Financial inclusion is one of the main issue on Islamic banking in providing access to financial services to the community. However there are many people who have not access to financial services, especially Islamic banking. This study aims to measure the level of Islamic financial inclusion in several OIC countries (Islamic Cooperation Organization) based on the classification of state income and to analyze the relationship of inclusion of Islamic finance with development. The calculation of the Islamic financial inclusion index used the Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) method. The response variable used in this study is ISFI and the predictor variable is GDP per capita, unemployment rate, number of cellular telephone users, and the population of the village. The method used is descriptive analysis and tobit regression analysis. This study used secondary data from 10 OIC member countries based on the level of state income in 2013-2016. Based on the results of data analysis, high income countries have a high average inclusion rate compared to middle income countries. While GDP per capita and the number of cellular telephone users has a positive effect to the development, meanwhile the unemployment rate has a negative effect.

Keywords: Development, OIC member countries, ISFI, tobit regression

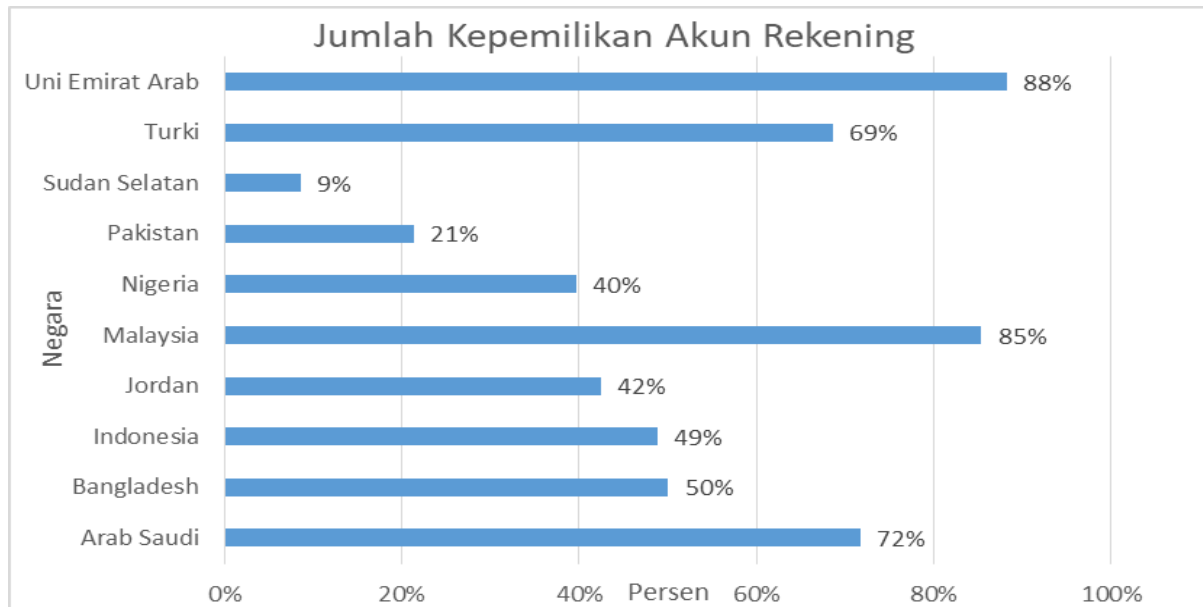
Abstrak. Masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses jasa keuangan, khususnya perbankan syariah, padahal inklusi keuangan merupakan isu utama perbankan di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan syariah di beberapa negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) berdasarkan pengelompokan pendapatan negara dan juga menganalisis hubungan inklusi keuangan syariah dengan tingkat pembangunan negara tersebut. Penghitungan indeks inklusi keuangan syariah menggunakan metode *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI). Variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah ISFI, variabel prediktornya GDP per kapita, tingkat pengangguran, jumlah pengguna telepon seluler, dan populasi penduduk desa. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi tobit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 10 negara anggota OKI berdasarkan pengelompokan tingkat pendapatan negara pada tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil analisis data, negara *high income* memiliki tingkat inklusi rata-rata yang tinggi dibandingkan negara *middle income*. Sedangkan variabel GDP per kapita dan jumlah pengguna telepon seluler berpengaruh positif terhadap pembangunan, adapun tingkat pengangguran berpengaruh negatif.

Kata kunci: Pembangunan, negara anggota OKI, ISFI, regresi Tobit.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang baik dapat ditandai dengan berkembangnya sistem keuangan di suatu negara dan stabilitas keuangan yang baik (Dienillah dan Anggraeni, 2016). Pembangunan ekonomi pun harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Kartono dan Nurcholis (2015), pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menggambarkan tingkat pertumbuhan *output* produksi suatu negara yang mengalami kenaikan berkala. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh *saving* atau investasi (Desweni, 2017). Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Namun, kenyataannya minat masyarakat terhadap *saving* dan

investasi masih rendah, hal ini digambarkan pada beberapa negara yang masih memiliki jumlah kepemilikan akun rekening yang rendah.



Sumber: Financial Index World Bank, 2017 (diolah)

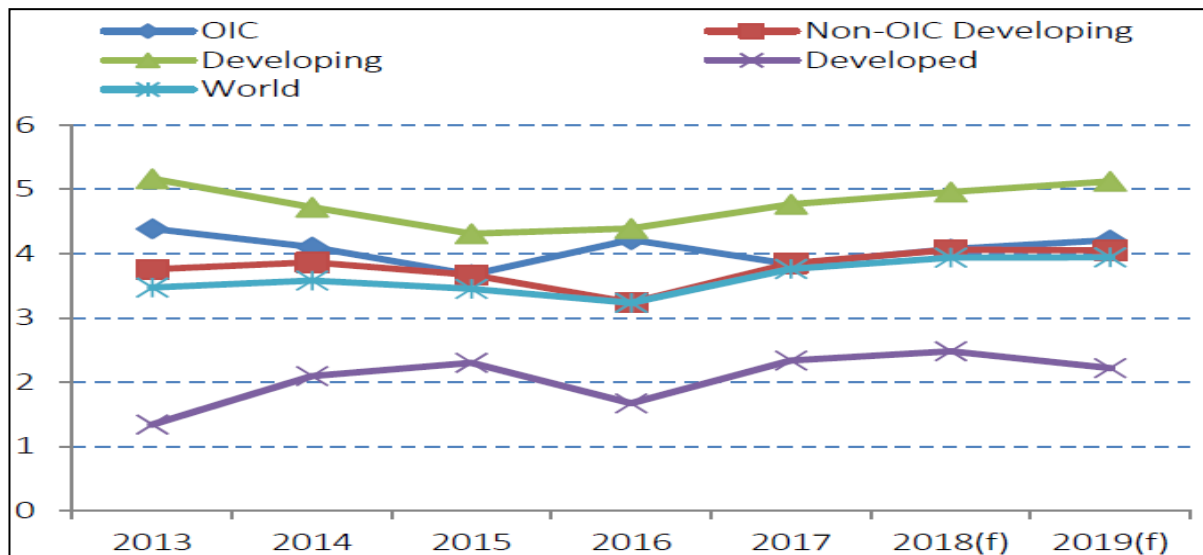
Gambar 1 Jumlah kepemilikan akun rekening 2017

Gambar 1 menggambarkan kepemilikan akun keuangan baik yang terdapat pada lembaga keuangan formal atau yang memiliki akun pada layanan keuangan berbasis *mobile phone*. Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata negara berkembang seperti Indonesia, Jordan, Nigeria memiliki jumlah pemilik akun lebih kecil dibandingkan dengan negara maju seperti Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Bahkan di beberapa negara berkembang memiliki kurang dari 50% penduduk yang memiliki akun di industri layanan keuangan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya akses layanan keuangan bagi masyarakat yang berada di negara-negara berkembang dan menggambarkan tingkat inklusi keuangan yang rendah.

Menurut Sarma (2012), *financial inclusion* merupakan sebuah proses yang memberikan jaminan kemudahan terhadap akses, manfaat, dan ketersediaan dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi, dalam hal ini khususnya lapisan masyarakat menengah ke bawah. Inklusi keuangan atau *financial inclusion* telah menjadi sorotan utama setelah terjadi krisis global pada 2008. Bank Indonesia (2011), menyadari bahwa hal tersebut dilatarbelakangi dari dampak krisis kepada kelompok *the bottom of the pyramid* (kelompok berpendapatan rendah, tidak tetap, tinggal di daerah terisolir, buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang pada umumnya mereka merupakan masyarakat *unbanked* dan tinggal di negara-negara berkembang. Keuangan inklusif mampu menjawab semua tantangan dari perekonomian suatu negara, seperti meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung pendalaman pasar keuangan, membuka peluang baru bagi industri perbankan, membantu peningkatan *Human Development Index* (HDI) suatu negara, dan berkontribusi dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi negara.

Keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bekerjasama dengan baik, karena kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif yang bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat *unbanked*, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera (Alamsyah, 2014). Prinsip perbankan syariah yang mengedepankan sistem *profit sharing* dan berorientasi *mashlahah* untuk semua umat. Saat ini, banyak negara yang sedang mengembangkan perbankan syariah, terutama negara-negara

yang telah bergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Berdasarkan laporan *Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life* menunjukkan, bahwa populasi negara-negara anggota OKI pada 2012 sekitar 1.6 miliar (23.4% dari total penduduk dunia). Selain itu, negara-negara anggota OKI memiliki *Economic size* sebesar 15% dari total PDB dunia (OIC Outlook, 2016). Hal ini menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan formal dalam menjalankan fungsi intermediasinya, tetapi sekaligus menjadi tantangan besar juga dalam menerapkan keuangan inklusi yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan berpendapatan rendah.



Sumber: OIC Economic Outlook, 2018

Gambar 2 Pertumbuhan GDP di dunia

Dalam laporan *OIC Economic Outlook 2018* (Gambar 2) menunjukkan bahwa PDB negara-negara OKI telah mengalami pertumbuhan sebesar 4.3% pada tahun 2016, walaupun terjadi penurunan menjadi 3.8% secara riil pada tahun 2017, dibandingkan dengan 4.3% pada tahun 2016. Namun demikian, prospek pertumbuhan di negara-negara OKI sedang cerah di tengah kenaikan ekonomi global, dengan *rebound* penting dalam perdagangan global dan kenaikan harga minyak. Rata-rata pertumbuhan GDP riil dalam negara berkembang non-OKI masih di bawah rata-rata negara anggota OKI selama periode 2013-2016. Rata-rata tingkat pertumbuhan di negara-negara OKI akan cenderung meningkat pada tahun 2018, dengan pertumbuhan rata-rata diperkirakan sekitar 4.1%.

Meskipun perekonomian beberapa negara OKI terus menguat, namun masih banyak masyarakat di negara anggota OKI yang belum dapat mengakses jasa keuangan terutama perbankan syariah. Berdasarkan Gambar 1, kurang dari 25% masyarakat Pakistan dan Sudan Selatan yang sudah memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Senada dengan survey Bank Dunia (2017), bahwa sebanyak 31 negara dari 57 negara anggota OKI, penduduknya mempunyai akses terhadap lembaga keuangan formal dan informal kurang dari 50%.

Secara keseluruhan, negara-negara anggota OKI hanya memiliki 44% masyarakat yang mempunyai akses ke lembaga keuangan formal. Hal ini menguatkan bahwa akses masyarakat negara-negara anggota OKI terhadap lembaga keuangan formal masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan. Program-program inklusi keuangan di beberapa negara anggota OKI sudah mulai dilakukan dengan berfokus pada peningkatan akses kepada masyarakat yang belum menikmati jasa-jasa keuangan lembaga keuangan formal. Hambatan aksesibilitas ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan dan rendahnya pembangunan infrastruktur lembaga keuangan formal yang ada. Oleh karena itu, inklusi keuangan menjadi salah satu fokus pembangunan di

berbagai negara, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat memengaruhi inklusi keuangan syariah di beberapa negara anggota OKI dari tahun 2013-2016. Negara-negara yang diteliti adalah 10 negara anggota OKI yaitu dua negara kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia), tiga negara kawasan Timur Tengah (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordan), dua negara kawasan Asia Selatan (Pakistan, Bangladesh), Sudan pada kawasan Afrika Utara, Turki pada kawasan Eurasia, dan Nigeria pada kawasan Afrika Barat. Negara lain yang juga masuk keanggotaan OKI belum dapat diteliti karena keterbatasan akses data terhadap variabel yang akan digunakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sarma dan Pais (2011) menyebutkan bahwa inklusi keuangan menghubungkan orang, terutama kelompok miskin dan rentan ke sistem perbankan formal dengan akses yang aman, mudah dan terjangkau ke kredit dan layanan keuangan lainnya.

Indikator Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan suatu negara atau daerah dapat diukur menggunakan beberapa indikator atau beberapa metode pendekatan lainnya (Ambarkhane *et al.*, 2016). Salah satu indikator yang biasa digunakan adalah indeks inklusi keuangan atau yang biasa disebut *Index of Financial Inclusion* (IFI). Beberapa peneliti mengukur inklusi keuangan dengan menghitung proporsi dari populasi penduduk dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal khususnya perbankan. Perhitungan IFI yang dikembangkan oleh Sarma (2012) menggunakan penghitungan berdasarkan tiga dimensi, yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan kegunaan. Selain diukur menggunakan *Index Financial Inclusion* (IFI), inklusi keuangan juga dapat diukur menggunakan indeks inklusi keuangan syariah atau *Index Syariah Financial Inclusion* (ISFI). Hal ini terjadi karena beberapa negara sudah menerapkan *dual banking system* (Hamzah, 2017).

Penghitungan *Index Syariah Financial Inclusion* (ISFI) yang dikembangkan oleh Umar (2017) mengacu pada metode penghitungan inklusi keuangan dengan pendekatan *Index Financial Inclusion* (IFI). Namun, ada beberapa dimensi penyesuaian yang terjadi pada ISFI. Terutama pada bagian dimensi penetrasi perbankan dan kegunaan, yang disesuaikan dengan kondisi perbankan syariah yang ada. Sehingga dapat merepresentasikan tingkat inklusi keuangan syariah yang ada pada suatu negara. Umar (2017) menjelaskan tiga dimensi penyesuaian dalam metode penghitungan *Index Syariah Financial Inclusion* (ISFI) yaitu:

1. Dimensi Aksesibilitas

Digunakan sebagai pengganti dimensi penetrasi perbankan pada IFI. Dimensi aksesibilitas ini menggunakan indikator jumlah dana pihak ketiga (DPK) sebagai ukuran seberapa luas penetrasi perbankan syariah yang ada. Perbankan syariah di sini mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Dimensi aksesibilitas ini diukur dengan rasio jumlah DPK perbankan syariah dibanding 1000 penduduk dewasa.

2. Dimensi Availibilitas

Digunakan untuk mengukur kemampuan jasa keuangan formal syariah dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Seberapa banyak perbankan syariah mampu memberikan penawaran terhadap akses pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator yang digunakan berupa kantor cabang dan atau ATM perbankan syariah yang meliputi bank perkreditan rakyat syariah.

3. Dimensi Penggunaan

Digunakan untuk mengukur fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat umum. Indikator yang digunakan berupa perbandingan total pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah PDB suatu negara.

Keuangan Inklusif dan Pembangunan

Berdasarkan penelitian Sarma dan Pais (2011) dan Sharma (2016) tentang *Financial Inclusion and Development*, menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia (IPM) dan inklusi keuangan memiliki hubungan positif. Negara yang memiliki GDP per kapita rendah, kesenjangan pendapatan yang tinggi, tingkat melek huruf, dan tingkat urbanisasi yang rendah menunjukkan rendahnya jaminan dalam mengakses jasa keuangan. Ketersediaan informasi yang diprosikan oleh panjang jalan, penggunaan telepon dan internet juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dari variabel perbankan, proporsi *non performing assets* dan *capital asset ratio* (CAR) memiliki hubungan negatif dengan inklusi keuangan. Kepemilikan asing maupun pemerintah di sektor perbankan, dan suku bunga tidak memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan. Adapun pembangunan menurut Kurniawan (2010) adalah suatu rangkaian proses dan cara untuk menuju perubahan yang berlangsung dan dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Objek pembangunan itu sendiri adalah masyarakat dari suatu negara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan. Sedangkan Arsyad (2010), mengatakan bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu kesatuan proses yang memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dan dapat diamati dan dianalisis.

Penelitian Ummah (2013) menunjukkan bahwa negara *high income* memiliki nilai *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang lebih tinggi daripada negara *middle income* dan *low income*. Regresi tobit dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat faktor pembangunan yang memengaruhi keuangan inklusif. Hasil yang diperoleh adalah tingkat pendapatan per kapita dan jumlah populasi penduduk desa memengaruhi inklusi keuangan. Sementara Sarma (2012), meneliti tentang metode pengukuran tingkat inklusi keuangan menggunakan *Index of Financial Inclusion* (IFI) di 55 negara, menunjukkan bahwa hanya 5 negara yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi, 9 negara memiliki tingkat inklusi keuangan menengah dan 41 negara memiliki tingkat inklusi yang rendah. Pengukuran tingkat inklusi keuangan ini menggunakan metode IFI yang terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator penetrasi perbankan yang diprosikan dengan jumlah rekening bank per 100,000 penduduk dewasa, indikator ketersediaan lembaga jasa keuangan yang diprosikan dengan jumlah cabang yang tersedia per 100,000 penduduk, dan indikator kegunaan yang diprosikan dengan presentase total kredit dan deposit terhadap GDP masing-masing negara.

Adapun penelitian Umar (2017) tentang *Index of Syariah Financial* (ISFI) di Indonesia menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah dengan indeks pembangunan manusia memiliki hubungan positif. Penelitian ini mengukur tingkat inklusi keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan 3 dimensi, yaitu: *penetration*, *availability*, dan *usage of banking service* khusus perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Hasil penelitiannya menunjukkan hanya ada satu provinsi yang memiliki tingkat inklusi keuangan syariah yang tinggi yaitu Bangka Belitung.

Indikator pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu:

Tabel 1 Variabel pembangunan yang memengaruhi inklusi keuangan

| Indikator | Variabel dan satuan |
|----------------|---|
| Sosial-Ekonomi | PDB per kapita Jumlah populasi penduduk desa (persen) Tingkat Pengangguran Koefisien Gini |
| Infrastruktur | Panjang jalan diaspal (KM) atau Panjang jalan diaspal per 1000 penduduk Jumlah telepon per 1000 penduduk Jumlah radio per 1000 penduduk Jumlah televisi kabel per 1000 penduduk Jumlah koran per 1000 penduduk Jumlah pengguna internet per 1000 penduduk Jumlah komputer pribadi per 1000 penduduk |
| Perbankan | <i>Capital Asset Ratio</i> <i>Non Performing Asset</i> <i>Share</i> bank asing dan pemerintah terhadap total aset sektor perbankan Suku bunga rill |

Sumber: Sarma dan Pais, 2011

METODE

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data panel dari 10 negara anggota OKI. Data dijadikan bahan analisis adalah data tahunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Karena keterbatasan data, dalam penelitian ini hanya menggunakan 10 negara anggota OKI. Namun, pemilihan negara yang dijadikan objek penelitian juga dipilih berdasarkan tingkat pendapatan suatu negara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan metode analisis *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) dan metode regresi tobit.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis sederhana yang memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran dari data yang akan digunakan, sehingga memudahkan untuk penggambaran dan penafsiran. Pada penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan tingkat inklusi keuangan syariah pada negara-negara anggota OKI.

Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI)

Indeks inklusi keuangan syariah atau *Index of Syariah Financial Inclusion* (ISFI) merupakan ukuran untuk tingkat inklusi keuangan syariah yang dikembangkan oleh Umar (2017). Indeks inklusi keuangan syariah ini mengadopsi pengukuran tingkat inklusi keuangan yang menggunakan *Index of Financial Inclusion* (IFI) pada penelitian Sarma (2012). Sehingga variabel yang akan digunakan mengacu pada dimensi pengukuran IFI yaitu dimensi penetrasi perbankan (D_1), dimensi ketersediaan jasa perbankan (D_2), dan dimensi penggunaan (D_3). Berikut penjelasan penjelasan dimensi yang digunakan dalam analisis *Index of Syariah financial Inclusion* (ISFI) :

Tabel 2 Indikator ISFI

| No. | Variabel | Indikator |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | Akseibilitas (D_1) | Rasio jumlah dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah dalam ribuan dollar per 1,000 penduduk dewasa, dihitung dengan rumus: $D_1 = \frac{\text{Jumlah DPK perbankan syariah (tahun}_{it})}{\text{Jumlah penduduk dewasa (tahun}_{it})} \times 1,000$ |
| 2. | Availibilitas (D_2) | Rasio jumlah kantor cabang perbankan syariah per 100,000 penduduk dewasa, dihitung dengan rumus: $D_2 = \frac{\text{Jumlah kantor cabang bank syariah (tahun}_{it})}{\text{Jumlah penduduk dewasa (tahun}_{it})} \times 100,000$ |
| 3. | Penggunaan (D_3) | Persentase jumlah pembiayaan pada perbankan syariah terhadap GDP, dihitung dengan rumus: $D_3 = \frac{\text{Jumlah pembiayaan (tahun}_{it})}{\text{GDP (tahun}_{it})} \times \%$ |

Sumber: Umar, 2017

Perbankan syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Karena keterbatasan data, maka dalam penelitian ini hanya menggunakan data yang ada pada BUS di masing-masing negara. ISFI ini mencakup tiga dimensi. Indeks dari setiap dimensi di, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$d_i = w_i \frac{D_i - m_i}{M_i - m_i} \quad (1)$$

d_i : nilai aktual dimensi i

w_i : bobot untuk dimensi i

D_i : nilai terkini dari peubah i

M_i : batas tertinggi dari peubah i

m_i : batas terendah dari peubah i

Persamaan (1) akan menghasilkan nilai $0 < d_i < 1$. Semakin tinggi nilai d_i , semakin tinggi pula perolehan negara di dimensi i . Jika terdapat n -dimensi dari inklusi keuangan yang dihitung, maka perolehan suatu negara dari dimensi tersebut direpresentasikan dengan titik $X = (d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ pada ruang n -dimensi. Dalam ruang n -dimensi, titik $O = (0, 0, 0, \dots, 0)$ menunjukkan titik kondisi inklusi yang buruk, sedangkan titik $W = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$ menunjukkan kondisi yang ideal dalam setiap dimensi. Letak titik X , O , dan W merupakan faktor penentu dalam mengukur tingkat inklusi keuangan syariah negara. Semakin besar jarak antara titik O dengan titik X , semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan syariah. Semakin kecil jarak antara titik X dengan titik W , semakin tinggi tingkat inklusi keuangan. Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan jarak antara W dan O agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh karena itu, nilai ISFI akan berada antara 0 dan 1 (Sarma, 2012). Semakin tinggi nilai indeks maka sistem keuangan semakin inklusif.

Jadi, hubungan antara titik X , W , O dapat dilambangkan sebagai berikut :

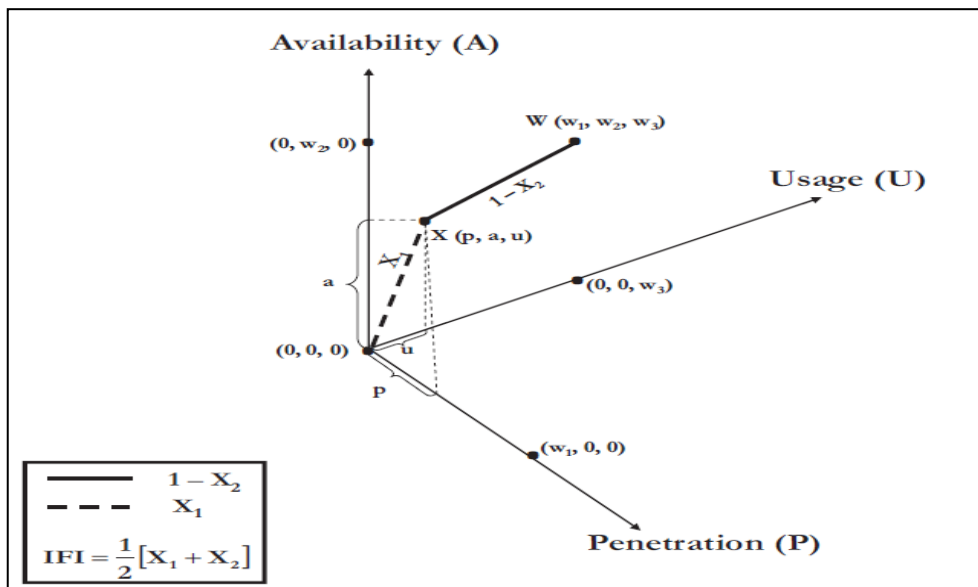
$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2}} \quad (2)$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1-d_1)^2+(w_2-d_2)^2+\dots+(w_n-d_n)^2}}{\sqrt{w_1^2+w_2^2+\dots+w_n^2}} \tag{3}$$

X_1 : jarak antara titik O dan X

X_2 : jarak antara titik X dan W

Hubungan titik-titik X, O , dan W jika dijelaskan dalam bentuk vektor adalah sebagai berikut :



Sumber: Umar, 2017

Gambar 3 Skema vektor keuangan inklusif

Dari penjelasan hubungan titik-titik diatas dan penjelasan vektor dari 3 dimensi ISFI, maka persamaan ISFI adalah sebagai berikut:

$$ISFI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \tag{4}$$

Nilai ISFI berada di antara 0 dan 1. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan data pembatas atau indikator untuk penghitungan bobot tiap dimensi, maka diasumsikan seluruh dimensi memiliki bobot yang sama besar, maka masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1. Memiliki bobot yang sama artinya setiap dimensi memiliki peranan yang sama dalam menentukan tingkat inklusi keuangan. Menurut Sarma (2012), rumus IFI didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai X_1 dan X_2 yang merepresentasikan posisi antara titik paling buruk dan titik ideal. Hasil pengukuran IFI dibagi menjadi tiga kategori:

1. IFI rendah jika nilai IFI kurang dari 0.3.
2. IFI medium jika nilai IFI berada di antara 0.3 dan 0.6.
3. IFI tinggi jika nilai IFI antara 0.6 dan 1.

Analisis Regresi Tobit

Regresi logistik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui variable-variabel pembangunan apa saja yang dapat memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah di negara-negara anggota OKI. Model tobit yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ISFI_{it} = b_0 + b_1 \ln_GDP_{it} + b_2 unemp_{it} + b_3 ruralpop_{it} + b_4 mphone_{it} + \epsilon_{it} \tag{5}$$

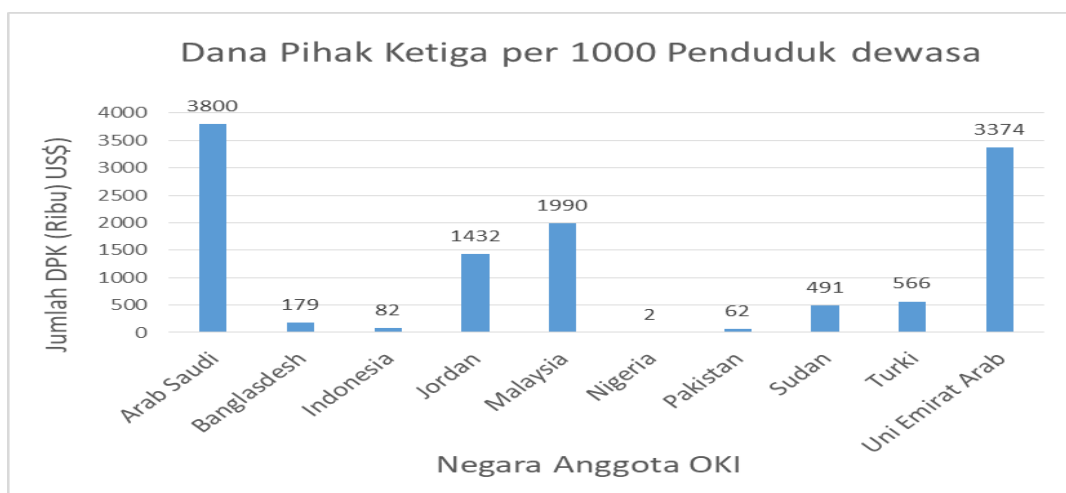
Keterangan :

- ISFI_{it} : *Index of Syariah Financial Inclusion* negara i tahun ke t[0,1]
 b₀ : Intersep
 b_i : Koefisien variabel ke-i
 ln_GDP_{it} : Nilai logaritma natural GDP per kapita negara i tahun ke-t
 unemp_{it} : Tingkat pengangguran (persen) negara i tahun ke-t
 ruralpop_{it} : Jumlah penduduk di pedesaan (persen) negara i tahun ke-t
 mphone_{it} : Nilai logaritma natural jumlah Pengguna telepon seluler negara i tahun ke-t
 ε_{it} : Galat (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Aksesibilitas

Keuangan yang inklusif ditandai dengan banyaknya pengguna layanan perbankan dan diukur dengan keterjangkauan secara menyeluruh di antara lapisan masyarakat. Semakin mudah masyarakat mendapatkan akses keuangan, maka semakin tinggi tingkat inklusi keuangan negara tersebut (Inoue dan Hamori, 2016). Proporsi dari populasi penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank merupakan indikator penetrasi perbankan. Variabel yang dapat mencerminkan penetrasi perbankan adalah jumlah DPK di perbankan syariah per 1,000 populasi penduduk dewasa. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan dua negara yang memiliki tingkat aksesibilitas perbankan syariah yang cukup tinggi dibandingkan negara lainnya. Ini menunjukkan negara tersebut memiliki jumlah pengguna perbankan syariah yang besar.



Sumber: Islamic Financial Services Board, 2017 (diolah)

Gambar 4 Rata-rata jumlah DPK per 1,000 populasi dewasa dari tahun 2013-2016

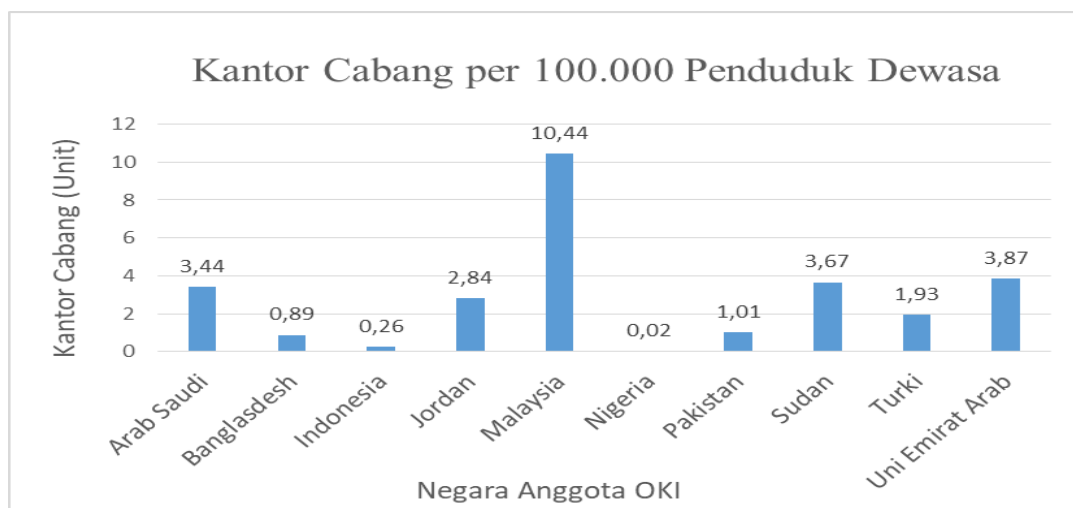
Jumlah DPK yang terkumpul di negara berpendapatan tinggi, cenderung lebih tinggi dan konstan dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah dan rendah. DPK Arab Saudi sekitar US\$3.8 juta per tahun dan Uni Emirat Arab sekitar US\$3.3 juta per tahun. Hal ini disebabkan, negara maju cenderung memiliki akses terhadap jasa keuangan lebih mudah dibanding negara kurang maju. Dua negara tersebut merupakan bagian dari GCC (*Gulf Cooperation Council*) atau dikenal dengan Dewan Kerjasama Teluk, dimana secara *global market share* perbankan syariah negara-negara GCC memiliki sebesar 43.7%. Adapun Arab Saudi menguasai *market share* sebesar 20.6% dan Uni Emirat Arab sebesar 9%.

Negara-negara *upper middle income* atau negara yang sedang berkembang rata-rata memiliki jumlah DPK per 1,000 penduduk dewasa sebesar US\$1.3 juta. Malaysia menyumbang 9.3% aset perbankan

syariah global dan dianggap sebagai pusat global untuk keuangan Islam. Malaysia memiliki banyak lembaga keuangan Islam, basis aset yang besar, serta tingkat kesadaran yang tinggi. Sedangkan negara-negara *lower middle income* atau negara berpendapatan menengah ke bawah memiliki rata-rata jumlah DPK per 1,000 penduduk dewasa sebesar US\$150,000. Meskipun sama-sama tergolong negara berkembang, namun negara *lower middle income* memiliki jumlah DPK yang jauh dibawah negara *upper middle income*. Seperti Nigeria yang hanya memiliki jumlah rata-rata DPK sebesar US\$2,000 US\$ per 1,000 penduduk. Hal ini dikarenakan sistem perbankan syariah baru masuk ke Nigeria pada tahun 2009 dan pemerintah Nigeria belum mendukung penuh sistem perbankan syariah, mengakibatkan perbankan syariah disana belum berkembang pesat (Abdullahi, 2016).

Dimensi Availibilitas

Selain dimensi aksesibilitas atau penetrasi perbankan syariah, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan jasa perbankan atau dimensi availibilitas. Indikator ini dapat menggambarkan sebagai kemampuan perbankan syariah dalam memberikan jangkauan layanan perbankan di mana pun masyarakat berada. Jangkauan ini dapat digambarkan dengan jumlah *outlet* (kantor pusat, kantor cabang, ATM, dan sebagainya). Dalam penelitian ini, dimensi availibilitas diukur menggunakan ketersediaan kantor cabang perbankan syariah khususnya bank umum syariah per 100,000 penduduk dewasa.



Sumber: Islamic Financial Services Board, 2017 (diolah)

Gambar 5 Rata-rata jumlah kantor cabang per 100,000 populasi dewasa dari tahun 2013-2016

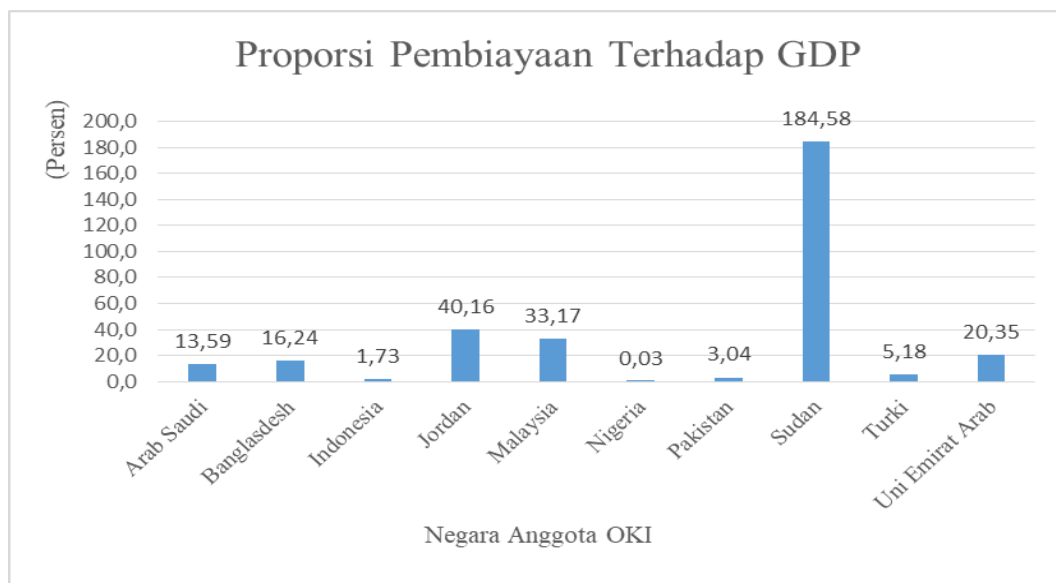
Dalam indikator availibilitas, Malaysia memiliki jangkauan jasa keuangan yang relatif lebih luas dibandingkan 9 negara anggota OKI lainnya dengan rata-rata memiliki 10 kantor cabang bank syariah untuk melayani 100,000 penduduk dewasa. Tidak seperti Nigeria yang hanya memiliki 2 kantor cabang untuk melayani 10 juta penduduk dewasa. Ini dikarenakan *market share* perbankan syariah di Nigeria baru mencapai kurang dari 2% dari keseluruhan aset perbankan nasional negara tersebut (IFSISR, 2017). Sedangkan di negara *high income* dan *upper middle income*, jumlah cabang bank syariah cenderung konstan dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang mengurangi jumlah cabang bank syariah, seperti negara Malaysia, Turki dan Uni Emirat Arab.

Turki mengurangi jumlah kantor cabang sebesar 120 unit pada tahun 2015-2016. Sedangkan negara-negara yang sedang berkembang, rata-rata melakukan penambahan kantor cabang sekitar 30 sampai 40 unit per tahun. Pakistan misalnya, rata-rata penambahan setiap tahunnya 175 unit kantor cabang baru. Di beberapa negara maju sudah mengembangkan *Financial Technology (FinTech)* yaitu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang dapat menggantikan kantor cabang dan melayani masyarakat. Seperti *mobile banking*, *internet banking*, *e-money* dan lain-lain.

Hal ini berbeda dengan negara *low income* dan *lower middle income* yang masih fokus mengembangkan dan melakukan pembangunan fisik layanan perbankan syariah seperti pendirian kantor cabang. Ini dapat dilihat dari kondisi beberapa negara yang menerapkan *dual banking system*, yang masih melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur pada *windows banking system* (Ummah, 2013).

Dimensi Penggunaan

Perbankan memiliki fungsi intermediasi, tidak terkecuali perbankan syariah. Sistem keuangan inklusif erat kaitannya dengan kebermanfaatan lembaga keuangan bagi seluruh masyarakat. Manfaat berupa produk-produk keuangan, seperti pembiayaan *mudharabah*, transfer, tabungan haji, deposito dan lain-lain. Oleh karena itu, selain jumlah DPK sebagai indikator dimensi aksesibilitas, indikator kebermanfaatan juga perlu dimasukkan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan syariah.



Sumber: Islamic Financial Services Board, 2017 (diolah)

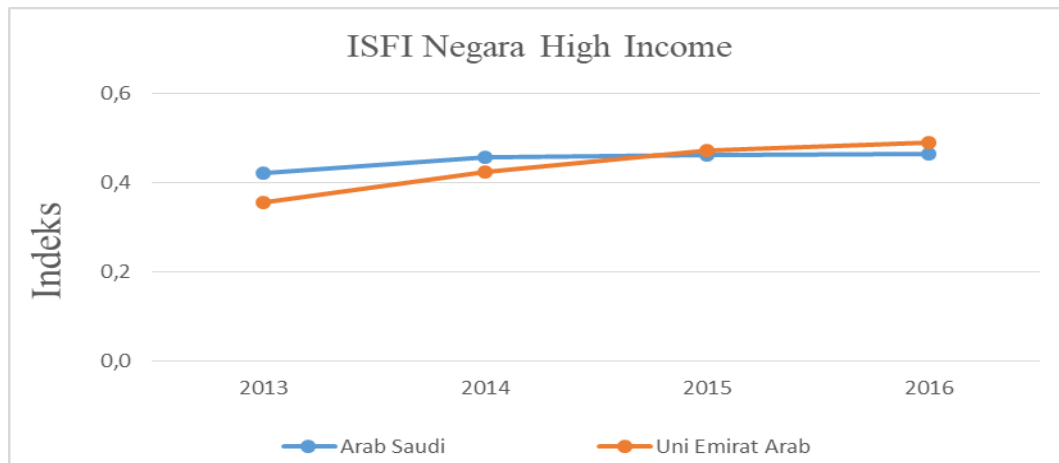
Gambar 6 Rata-rata proporsi total pembiayaan terhadap GDP (persen) dari tahun 2013-2016

Berbeda dengan dimensi aksesibilitas dan dimensi availibilitas, pada dimensi kebermanfaatan/kegunaan negara *middle income* (*upper middle income* dan *lower middle income*) cenderung memiliki proporsi pembiayaan lebih tinggi dibanding negara *high income*. Sebagai contoh, Sudan memiliki rata-rata proporsi pembiayaan terhadap GDP sebesar 184.6%, diikuti oleh Jordan sebesar 40.2% dan Malaysia sebesar 33.2%. Ini dikarenakan Sudan memiliki *market share* perbankan syariah sebesar 100% dan tidak memiliki bank konvensional. Selain itu, di negara berkembang, masih banyak rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksinya bergantung pada perbankan. Sudan sendiri memiliki proporsi pembiayaan di tahun 2016 sebesar 231% dengan persentase pembiayaan *murabahah* mencapai lebih dari 50% (Ebrahim, 2011). Sehingga, proporsi pembiayaan terhadap GDP di beberapa *middle income* relatif lebih besar dibandingkan dengan negara *high income*.

Perbandingan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Antarnegara

ISFI negara *high income*

Tingkat inklusi keuangan syariah pada negara *high income* relatif lebih tinggi dibandingkan negara *middle income* dan *low income*. Rata-rata indeks inklusi keuangan syariah pada negara *high income* sebesar 0.44. Hal ini karena pembangunan di negara *high income* lebih cepat terjadi dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah dan bawah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zins dan Weill (2016), mendapatkan bahwa faktor pendapatan dan pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingginya inklusi keuangan di Negara Afrika.

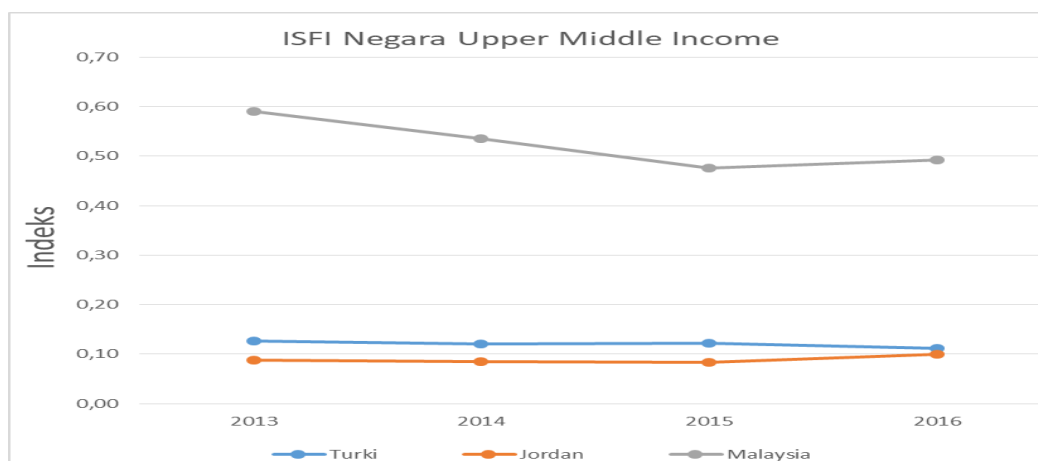


Sumber: Islamic Financial Services Board, 2017 (diolah)

Gambar 7 *Index of syariah financial inclusion* negara *high income* dari tahun 2013-2016

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang hampir sama dengan nilai masing masing sebesar 0.45 dan 0.43. Tingginya tingkat inklusi keuangan syariah di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikarenakan tingginya dimensi aksesibilitas dan dimensi availibilitas. Dimensi aksesibilitas yang dicerminkan dengan jumlah DPK di bank syariah memiliki rata-rata US\$3.8 juta dan US\$3.4 juta pada tahun 2013-2016. Jumlah ini relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain.

ISFI negara *upper middle income*



Sumber: Islamic Financial Services Board, 2017 (diolah)

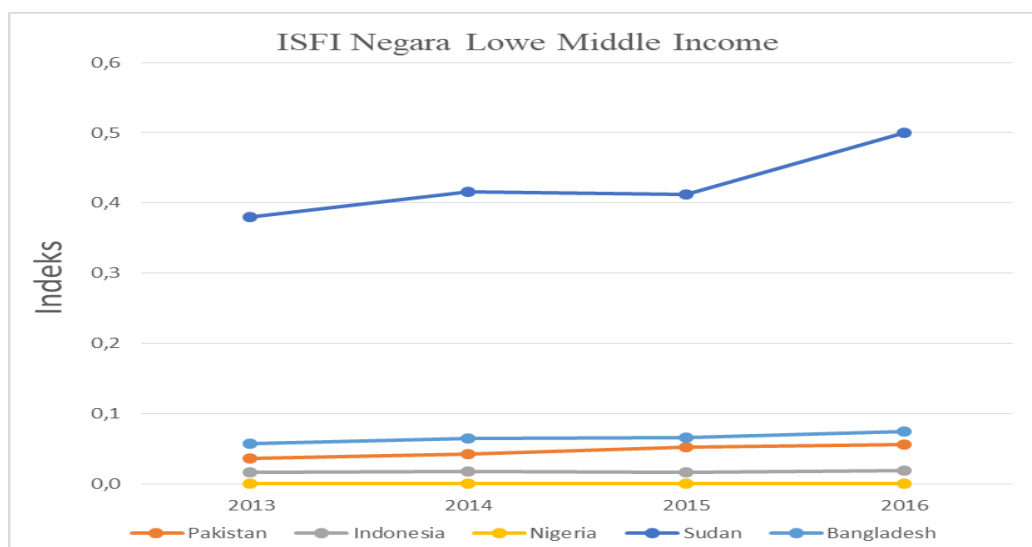
Gambar 8 *Index of syariah financial inclusion* negara *upper middle income* tahun 2013-2016

Tingkat inklusi keuangan syariah pada negara berpendapatan menengah atas menunjukkan hasil yang bervariasi. Dengan rata-rata nilai ISFI pada negara golongan ini sebesar 0.24 Tingkat inklusi keuangan syariah tertinggi pada level negara *upper middle income* ditempati oleh Malaysia dengan rata-rata ISFI sebesar 0.52 pada periode tahun 2013 sampai 2016. Tingginya tingkat inklusi keuangan syariah di Malaysia dipengaruhi oleh dimensi availibilitas yang digambarkan dengan jumlah kantor cabang bank syariah yang memiliki rata-rata 10 unit untuk melayani 100,000 penduduk dewasa. Namun, pada dimensi aksesibilitas yang digambarkan dengan jumlah DPK mengalami penurunan cukup besar dengan rata-rata penurunan sebesar 477 unit pada tahun 2013-2016. (Gambar 8)

Sedangkan tingkat inklusi keuangan di negara Jordan dan Turki pada tahun 2013-2016 cenderung konstan dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dikarenakan dimensi pembangunan tingkat inklusi keuangan di negara ini cenderung stabil dengan rata-rata nilai tingkat inklusi keuangan sebesar 0.08 dan 0.12.

ISFI negara *lower middle income*

Tingkat inklusi keuangan syariah pada negara *lower middle income* tergolong masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara *middle income*. Semua negara pada golongan pendapatan ini memiliki nilai indeks inklusi keuangan syariah yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2013-2016. Dengan rata nilai ISFI pada negara *lower middle income* pada penelitian ini sebesar 0.11. Nilai indeks inklusi keuangan syariah paling tinggi dimiliki oleh Sudan dengan rata-rata sebesar 0.42. Nilai ini relatif lebih besar dibandingkan dengan dua negara golongan *upper middle income* yaitu Turki dan Jordan. Hal ini disebabkan oleh dimensi kebermanfaatan/ kegunaan pada negara Sudan memiliki nilai paling tinggi dalam penelitian ini.



Sumber: Islamic Financial Services Board, 2017 (diolah)

Gambar 9 *Index of syariah financial inclusion* negara *lower middle income* tahun 2013-2016

Nilai indeks inklusi keuangan syariah yang rendah dan cenderung naik pada negara *lower middle income* menggambarkan bahwa negara tersebut sedang dalam tahap pengembangan perbankan syariah. Ini ditunjukkan dengan dimensi availibilitas di 5 negara meningkat setiap tahunnya. Dengan rata-rata penambahan kantor cabang perbankan syariah sebesar 175 unit dan 73 unit untuk Pakistan dan Bangladesh. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan negara-negara ini menunjukkan adanya perkembangan industri keuangan syariah ke arah yang lebih inklusif. Hal lain diperkuat dengan Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 oleh OJK, bahwa indeks inklusi keuangan syariah Indonesia pada 2016 hanya sebesar 11% dengan indeks inklusi keuangan syariah pada sektor perbankan sebesar 10%. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Grohmann, *et al.*,

(2018), bahwa tingkat inklusi keuangan suatu negara dipengaruhi oleh tingkat literasi dan juga tingkat pendapatan penduduk suatu negara.

Pengaruh Pembangunan terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Tingkat inklusi keuangan dapat dipengaruhi beberapa faktor pembangunan (Kim, 2016), seperti kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan sektor perbankan. Sementara hasil penelitian Kim et al. (2018) menemukan bahwa inklusi keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 55 negara OKI. Ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini, faktor pembangunan yang digunakan hanya dari sektor sosial ekonomi dan infrastruktur. Untuk mengetahui hubungan pembangunan dengan inklusi keuangan syariah, dalam penelitian ini menggunakan regresi tobit. Berikut hasil pengolahan menggunakan regresi tobit:

Tabel 3 Hasil regresi tobit

| Variabel | Koefisien | z-Statistic | Prob. |
|--------------|-----------|-------------|--------------|
| LnGDPKAP | 0.091 | 2.18 | 0.02* |
| UNEMPLOYMENT | -0.019 | -2.77 | 0.00* |
| RURALPOP | 0.004 | 1.65 | 0.09 |
| MOBILEPHONE | 0.346 | 2.35 | 0.01* |
| C | -0.500 | -0.70 | 0.48 |

*signifikan pada taraf nyata 5%

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3, variabel yang berpengaruh signifikan memengaruhi indeks inklusi keuangan adalah GDP per kapita, tingkat pengangguran, dan jumlah pengguna telepon genggam. Hal ini dapat dilihat dari nilai *p-value* variabel di bawah taraf nyata 5%. GDP per kapita dan jumlah pengguna telepon genggam berpengaruh positif dan signifikan. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan jumlah penduduk desa tidak memengaruhi secara signifikan pada taraf nyata.

Variabel GDP per kapita berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5% terhadap inklusi keuangan syariah dan memiliki koefisien 0.091. Artinya, setiap kenaikan GDP per kapita 1% maka inklusi keuangan syariah akan meningkat sebesar 0.091% saat variabel lain dianggap konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ummah (2013) bahwa tingkat pendapatan dapat menjelaskan kondisi inklusi keuangan suatu negara. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan syariahnya. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka terjadi kecenderungan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sejalan dengan penelitian (Sarma, 2012) bahwa tingkat pendapatan menjadi variabel penting dalam menjelaskan inklusi keuangan baik di tingkat individu maupun negara.

Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan syariah pada taraf nyata 5% dengan koefisien sebesar -0.019. Artinya, setiap kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1% maka inklusi keuangan syariah akan menurun sebesar 0.019% saat variabel lain dianggap konstan. Pengangguran menyebabkan seseorang tidak mempunyai pendapatan, sehingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengakses jasa keuangan ke lembaga keuangan. Semakin banyak pengangguran maka semakin kecil tingkat inklusi keuangan syariah pada Negara tersebut (Ummah, 2013).

Jumlah pengguna telepon seluler berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan syariah pada taraf nyata 5% dengan koefisien sebesar 0.348. Artinya, setiap kenaikan jumlah pengguna telepon seluler sebesar 1% maka tingkat inklusi keuangan syariah naik sebesar 0.348%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan telepon seluler menjadi penting dalam menunjang inklusi keuangan, karena dengan telepon seluler masyarakat bisa dengan mudah mengakses jasa keuangan. Sejalan dengan penelitian Sarma dan Pais (2011) bahwa variabel telepon seluler berpengaruh positif

terhadap inklusi keuangan syariah. Telepon seluler biasanya digunakan sebagai alat untuk mengakses keuangan pada aplikasi *financial technology*. Penelitian Ozili (2018) menemukan bahwa *financial technology* melalui telepon seluler memberikan dampak positif terhadap tingkat inklusi keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kondisi tingkat inklusi keuangan syariah di negara-negara OKI sangat dipengaruhi oleh tingkat pembangunan negara tersebut. Negara-negara Negara *high income* seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki indeks inklusi keuangan syariah rata-rata yang relatif tinggi yaitu sebesar 0.44. Negara *middle income* terbagi menjadi dua yaitu *upper middle income* dan *lower middle income*. Negara-negara *upper middle income* memiliki rata-rata nilai ISFI relatif lebih besar dibandingkan negara *lower middle income*. Dengan nilai masing-masing indeks inklusi keuangan syariah sebesar 0.24 dan 0.11. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan negara, maka semakin tinggi pembangunan pada negara tersebut dan memiliki nilai indeks inklusi keuangan syariah yang relatif lebih besar dibandingkan negara berpendapatan menengah.

Hampir seluruh masyarakat di negara *high income* mengenal dan memanfaatkan lembaga keuangan. Tingginya pendapatan per kapita di negara-negara *high income* membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses jasa keuangan dan didukung juga oleh infrastruktur lembaga jasa keuangan yang memadai. Berbeda dengan negara-negara *middle income* khususnya *lower middle income* yang masih terdapat hambatan bagi masyarakat untuk mengakses jasa keuangan. Hal ini karena pembangunan di sektor keuangan terutama perbankan belum cukup baik.

Variabel-variabel pembangunan yang berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan syariah adalah pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan jumlah pengguna telepon seluler. Pendapatan per kapita dan jumlah pengguna telepon seluler signifikan memengaruhi positif indeks inklusi keuangan syariah. Tingkat pengangguran memengaruhi negatif terhadap tingkat inklusi keuangan. Artinya, semakin sedikit jumlah pengangguran, maka keuangan syariah semakin inklusi. Sedangkan jumlah populasi penduduk desa tidak memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah.

Saran

1. Perbankan syariah, khususnya pada negara *lower middle income* diharapkan terus menambah akses layanan yang lebih banyak dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, agar dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah.
2. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong inklusi keuangan syariah.
3. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan lebih banyak variabel dan indikator pembangunan lainnya, agar menghasilkan pengukuran yang komprehensif terhadap tingkat inklusi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, N. A. (2016). Islamic Banking in Nigeria: Issues and Prospects. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*, 4(2).
- Alamsyah, H. (2015). Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah. *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Ambarkhane, D., Singh, A. S., & Venkataramani, B. (2016). Measuring financial inclusion of Indian states. *International Journal of Rural Management*, 12(1), 72-100.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN.
- Desweni, S. P. (2017). Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Menara Ekonomi*, 3(5).

- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(4), 410-430.
- Ebrahim, M. S. (2011). Islamic Banking in Sudan. Available at SSRN 1926895.
- Grohmann, A., Klihs, T., & Menkhoff, L. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*, 111, 84-96.
- Hamzah, N. R. (2017). *Pengaruh Faktor-faktor Kependudukan terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- [IFSB] Islamic Financial Services Board. (2017). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016*. Tersedia pada: <http://www.ifsb.org/>
- Inoue, T., & Hamori, S. (2016). Financial access and economic growth: Evidence from Sub-Saharan Africa. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(3), 743-753.
- Kartono, T., & Nurcholih, H. (2015). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Jakarta (ID): Universitas Terbuka.
- Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research in International Business and Finance*, 43, 1-14.
- Kim, J. H. (2016). A study on the effect of financial inclusion on the relationship between income inequality and economic growth. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(2), 498-512.
- Kuncoro, M., (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Demirgüç-Kunt, A., Honohan, P., & Beck, T. (2008). *Finance for all?: Policies and Pitfalls in Expanding Access*. World bank.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 [internet]. [diunduh pada 2019 Februari 21]. Tersedia pada <http://www.ojk.go.id/>.
- Ozili, P. K., (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329-340.
- [SESRIC] Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries. 2016. OIC Countries in Figures (OIC-CIF) [internet]. [diunduh pada 2016 Mei 28]. Tersedia pada: <http://www.sesric.org/>.
- Sarma, M., & Pais, J., (2011). Financial Inclusion and Development. *Journal of international development*, 23(5), 613-628.
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion—A Measure of Financial Sector Inclusiveness. *Centre for International Trade and Development, School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University. Delhi, India*.
- Sharma, D. (2016). Nexus between financial inclusion and economic growth: Evidence from the emerging Indian economy. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13-36.
- Umar, A. I., (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol 20 (1), 100-126.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L., (2015). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4 (1).
- World Bank. (2017). World Development Indicators (WDI). Tersedia pada: <http://data.worldbank.org/>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46-57.